



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor : SE- 2354 /MK.02/2009

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN (APBN-P)
TAHUN 2009

Menindaklanjuti hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI dalam pembahasan APBN-P tahun 2009 yang telah diputuskan dalam Rapat Paripurna Luar Biasa DPR RI tanggal 3 Agustus Tahun 2009 bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN Tahun 2009 dan upaya mengatasi dampak krisis global melalui program stimulus fiskal serta untuk menjaga pencapaian sasaran utama program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional, perlu dilakukan penyesuaian pagu anggaran pada beberapa Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun Anggaran 2009.
2. Penyesuaian pagu sebagaimana tersebut pada butir 1, meliputi perubahan target PNBPN, perubahan pinjaman dan hibah luar negeri, realokasi dana stimulus fiskal, serta pencatatan luncturan PNPM Mandiri Tahun 2008 (sebagai Anggaran Belanja Tambahan Tahun 2009 yang sudah dilaksanakan sampai dengan bulan April 2009).
3. Perubahan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dalam APBN-P Tahun 2009 bersumber dari Rupiah Murni, PNBPN, dan PHLN sebagaimana terlampir.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Berdasarkan pagu APBN-P Tahun 2009 masing-masing Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sehingga Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dapat ditetapkan.
5. Untuk luncuran PNPM Mandiri Tahun 2008 pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal yang sudah diterbitkan DIPA-L agar membuat RKA-KL tersendiri.
Adapun penyusunan RKAKL sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 5 harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/MK.05/2008 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2009.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 64/MK.02/2008 tentang Standar Biaya Tahun 2009.
 - c. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 06/MK.02/2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009.
 - d. Total pagu SAPSK (setelah Perubahan) tidak boleh melampaui pagu APBN-P kecuali jika sebelumnya terdapat luncuran/percepatan penarikan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) atau tambahan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
6. Perubahan alokasi APBN-P yang bersumber dari PNBP dan PHLN agar dilakukan penelitian terlebih dahulu atas hal berikut :
 - a. Apabila terhadap alokasi tersebut sudah diterbitkan SAPSK-nya berdasarkan PMK No. 06/PMK.02/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Tata Cara Perubahan Rincian ABPP dan Perubahan DIPA Tahun 2009, maka perubahan pagu anggaran tersebut tidak perlu dimuat dalam RKA-KL.
 - b. Dalam hal alokasi tersebut belum diterbitkan SAPSK-nya maka perubahan pagu anggaran tersebut harus dituangkan dalam RKA-KL.
7. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan APBN-P Tahun 2009, diminta agar Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang telah disesuaikan segera disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran dan tembusan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat tanggal 28 Agustus Tahun 2009.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

8. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) sebagaimana dimaksud pada butir 7 adalah RKA-KL yang telah disepakati bersama dengan Komisi DPR-RI terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 24 Agustus 2009



Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4. Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Republik Indonesia
5. Sekretaris Kabinet
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
7. Direktur Jenderal Anggaran



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR SE-2354 /MK.02/2009
TANGGAL 24 AGUSTUS 2009

PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - PERUBAHAN (APBN-P) 2009

(ribu rupiah)

BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERUBAHAN			
		RM	PNBP/BLU	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	-	-	-	-
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	-	-	-
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	-	-	-	-
005	MAHKAMAH AGUNG	-	-	-	-
006	KEJAKSAAN AGUNG	-	-	-	-
007	SEKRETARIAT NEGARA	-	-	-	-
	- BLU PPK Gelora Bung Karno	-	182.737.277	-	182.737.277
	- BLU PPK Kemayoran	-	95.251.681	-	95.251.681
		-	87.485.596	-	87.485.596
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	26.523.345	-	53.693.164	80.216.509
	- Luncuran PNPM	26.523.345	-	53.693.164	80.216.509
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	-	143.072.736	-	143.072.736
	- PNBP	-	143.072.736	-	143.072.736
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	-	-	-	-
013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	-	2.493.238	-	2.493.238
	- PNBP Ditjen AHU	-	2.493.238	-	2.493.238
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	-	(2.278.318)	-	(2.278.318)
	- BLU STAN	-	4.000.000	-	4.000.000
	- PNBP DJBC	-	(6.278.318)	-	(6.278.318)
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	(390.000.000)	21.982.121	-	(368.017.879)
	- PNBP Balitbang Pertanian	-	1.519.582	-	1.519.582
	- PNBP Badan Karantina Pertanian	-	20.462.539	-	20.462.539
	- Stimulus Fiskal	(390.000.000)	-	-	(390.000.000)
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	-	-	-	-
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	-	156.813.829	19.500.000	176.313.829
	- Hibah Belanja Modal	-	-	19.500.000	19.500.000
	- PNBP Ditjen Perhubungan Laut	-	47.392.951	-	47.392.951
	- PNBP Ditjen Perhubungan Udara	-	105.910.682	-	105.910.682
	- PNBP Badan Diklat Perhubungan	-	3.510.196	-	3.510.196
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	-	200.363.346	(22.500.000)	177.863.346
	- Hibah ke Daerah	-	-	(22.500.000)	(22.500.000)
	- PNBP ISI Surakarta	-	761.057	-	761.057
	- PNBP Univ. Jambi	-	34.744.897	-	34.744.897
	- PNBP Univ. Sam Ratulangi	-	36.210.054	-	36.210.054
	- PNBP Univ. Cendrawasih	-	6.930.000	-	6.930.000
	- PNBP Univ. Terbuka	-	119.796.978	-	119.796.978
	- PNBP Poltek Medan	-	1.920.360	-	1.920.360
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	-	212.408.938	7.000.000	219.408.938
	- CHSP / Bansos	-	-	7.000.000	7.000.000
	- PNBP Ditjen Bina Kesmas	-	764.700	-	764.700
	- PNBP Ditjen P2 dan PL	-	3.111.720	-	3.111.720
	- PNBP Balitbang Kesehatan	-	7.267	-	7.267
	- PNBP PPSDM	-	208.525.251	-	208.525.251
025	DEPARTEMEN AGAMA	-	4.370.071	-	4.370.071
	- PNBP STAIN Pare-pare	-	577.169	-	577.169
	- PNBP STAIN Curup	-	1.146.653	-	1.146.653
	- PNBP STAIN Ternate	-	131.475	-	131.475
	- PNBP STAIN Manado	-	415.375	-	415.375
	- PNBP STAIN Malikussaleh	-	320.000	-	320.000



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR SE-2354 /MK.02/2009
TANGGAL 24 AGUSTUS 2009

PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - PERUBAHAN (APBN-P) 2009

(ribu rupiah)

BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERUBAHAN			
		RM	PNBP/BLU	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	- PNBP STAIN Palangkaraya	-	867.410	-	867.410
	- PNBP STAIN Jursiwa Metro	-	911.989	-	911.989
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	124.387.115	-	124.387.115
	- PNBP Setjen	-	122.782.824	-	122.782.824
	- PNBP Dtjeri Binalattas	-	1.604.291	-	1.604.291
027	DEPARTEMEN SOSIAL	-	328.258	-	328.258
	- PNBP STKS	-	328.258	-	328.258
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	-	(209.876.210)	-	(209.876.210)
	- PNBP SDA Non Migas	-	(209.876.210)	-	(209.876.210)
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	-	1.078.000	29.800.000	30.878.000
	- Luncuran PNPM	-	-	29.800.000	29.800.000
	- PNBP SDA	-	1.078.000	-	1.078.000
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLTIK DAN KEAMANAN	-	-	-	-
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	-	-	-	-
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	-	-	-	-
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	-	-	-	-
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	-	-	-	-
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	-	-
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	-	-	-
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	-	-	-	-
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	-	-	-	-
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-
054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	-	-	-
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN / BAPPENAS	-	-	-	-
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	-	30.637.024	-	30.637.024
	- PNBP	-	30.637.024	-	30.637.024
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	84.376.630	84.376.630
	- Proyek SP-012 : Improvement of TV Transmitting Station (ITTS Spanyol)	-	-	27.030.000	27.030.000
	- Proyek EDCF-INA-13 : National ICT Human Resources Development (NICT HRD-Korea)	-	-	52.793.972	52.793.972
	- Hibah Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA) - IBRD	-	-	4.552.658	4.552.658
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	-	-	-
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	-	-	-	-
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	-	-	-
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	-	-	-	-
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	-	-	191.300.000	191.300.000
	- Luncuran PNPM	-	-	191.300.000	191.300.000
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	-	-	-	-
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	-	-	-	-
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	-	18.282.360	-	18.282.360
	- PNBP	-	18.282.360	-	18.282.360
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	-	-	-	-
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	-	-	-



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

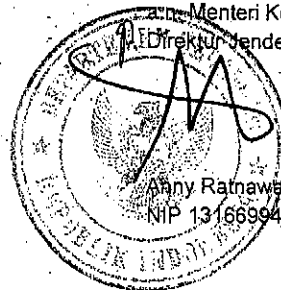
LAMPIRAN SURAT EDARAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR SE-2354 /MK.02/2009
TANGGAL 24 AGUSTUS 2009

PERUBAHAN ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
MENURUT SUMBER DANA DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - PERUBAHAN (APBN-P) 2009

(ribu rupiah)

BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PERUBAHAN			
		RM	PNBP/BLU	PHLN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	-	-	-
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	-	7.626.910	-	7.626.910
	- PNB	-	7.626.910	-	7.626.910
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	-	1.921.736	-	1.921.736
	- PNB	-	1.921.736	-	1.921.736
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	-	-	-	-
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	-	10.039.396	-	10.039.396
	- BLU Pusat Pemanfaatan Teknologi Kedirgantaraan	-	10.039.396	-	10.039.396
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	2.874.900	-	2.874.900
	- PNB	-	2.874.900	-	2.874.900
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	-	-	-
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	-	-	-
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	-	3.043.370	-	3.043.370
	- PNB	-	3.043.370	-	3.043.370
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	-	-	-	-
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	-	-	-	-
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	-	1.052.906	-	1.052.906
	- PNB BPEN (BPPEI)	-	(1.425.000)	-	(1.425.000)
	- PNB Ditjen Perdag LN	-	2.180.259	-	2.180.259
	- PNB Ditjen Perdag DN	-	297.648	-	297.648
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	-	-	-	-
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	-	-	-
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	-	-	-	-
100	KOMISI YUDISIAL RI	-	-	-	-
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	-	10.393.086	10.393.086
	- SCDRR	-	-	10.393.086	10.393.086
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI)	-	-	-	-
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	-	-	-	-
	JUMLAH	(363.476.655)	913.359.004	373.562.880	923.445.229

Menteri Keuangan R.I.
Direktur Jenderal Anggaran



Anny Ratnawati
NIP 131669947